

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang teori efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan sampai mana pencapaian itu didapat hasilnya. Senantiasa dihubungkan dengan pengertian atau definisi dari efisien. Efektivitas lebih menekankan atau tertuju kepada pada hal yang kita capai, sedangkan efisiensi lebih pada melihat bagaimana cara untuk mencapai sebuah hasil yang ingin dicapai, dengan cara membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah berbeda tetapi sangat saling berkaitan dan patut dicermati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.¹

Efektivitas adalah tingkatan atau level dari suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Efektivitas disini didefinisikan sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor yang ada didalam maupun diluar diri seorang. Dengan definisi diatas maka efektivitas tidak hanya dapat dilihat atau dipandang dari sudut pandang produktivitas nya saja, akan tetapi tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.² Dapat dikatakan efektif apabila sesuatu usaha atau tujuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan.

¹repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1672/BAB%20II.pdf dikases tanggal 04 mei 2017 pukul 18.00 WIB

²Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan,(Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm 31

Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai apa yang menjadi tujuan sebelumnya. Apabila suatu kegiatan maupun sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah instansi dapat mencapai apa yang diinginkan dalam melaksanakan sebuah program sesuai dengan wewenang instansi, tugas instansi dan fungsi instansi tersebut baru bisa dikatakan efektif³.

2. Efektivitas Hukum

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama untuk dapat mengukur seberapa efektif suatu aturan hukum itu dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh masyarakat. jika suatu aturan hukum dipatuhi oleh sebagian besar target aturan hukum tersebut yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁴Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwasannya efektif atau tidaknya suatu aturan hukum tersebut dilihat dari 5 faktor, yaitu :⁵

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Faktor dari penegak hukum
- c. Faktor dari ruang/kaadaan yang mendukung penegakan hukum tersebut.
- d. Faktor dari masyarakat itu sendiri
- e. Faktor kebudayaan

Dari kelima faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum itu sangat berkaitan atau berkesinambungan, maka kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

³http://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 19.00 WIB

⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm.375

⁵ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 8.

Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif pada elemen pertama yaitu⁶:

- a. Peraturan yang ada sudah sangat sistematis.
- b. Peraturan tersebut sudah sinkron, dan tidak ada pertentangan secara hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Secara garis besar peraturan hukum tersebut haruslah kualitatif dan kuantitatif untuk mengatur suatu bidang-bidang dalam kehidupan manusia.
- d. Penerbitan sebuah peraturan haruslah sesuai dengan persyaratan yuridis.

Selanjutnya dilihat dari elemen nomor dua yang menentukan efektif atau tidaknya hukum adalah aparat yang terkait. Dalam elemen nomor dua di inginkan adanya aparat atau petugas yang handal. Kehandalan disini adalah kehandalan untuk melakukan tindakan sesuai dengan koridor dan peruntukannya.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum tertulis dapat dinilai dari segi aparat yaitu⁷:

- a. Sampai mana petugas tersebut terikat oleh peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan suatu kebijaksanaan terkait peraturan.
- c. Teladan atau contoh apa yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai mana penugasan yang diberikan oleh suatu peraturan hukum tersebut kepada petugas terkait yang memberikan batasan yang tegas pada wewenangnya yang diembannya.

⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80

⁷*Ibid hal :82*

Pedoman suatu efektivitas dari elemen-elemen prasarana, dimana fasilitas tersebut haruslah secara jelas dan terang memang menjadi suatu bagian yang memberikan kontribusi dan peran untuk kelancaran tugas aparat terkait ditempat atau lokasi kerja para aparat tersebut. Elemen tersebut adalah⁸:

- a. Prasarana yang dimiliki sudah terawat dengan baik atau belum.
- b. Prasarana yang belum harus segera dianggarkan dengan memperhitungkan biaya dan waktu penganggaran.
- c. Prasarana yang kurang baik harus segera dilengkapi oleh pihak terkait.
- d. Prasarana yang sudah rusak atau cacat perlu segera dibenahi.
- e. Prasarana yang macet dan tidak bisa digunakan perlu segera diperbaiki lagi agar bisa berfungsi.
- f. Prasarana yang sudah tua atau berumur harus segera diganti dengan yang baru.

Kemudian ada beberapa lagi elemen pengukur dari efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat itu sendiri, yaitu :

- a. Disebabkan karena masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang sudah ada meskipun peraturan itu baik.
- b. Dikarenakan masyarakat mau mematuhi ataupun tunduk dengan peraturan yang sudah ada meskipun peraturan itu dibuat sangat baik dan aparat yang terkait dengan peraturan itu sudah profesional.
- c. Dan disebabkan karena golongan masyarakat itu tidak mau mematuhi peraturan yang sudah dibuat dengan sangat baik, dari aparat atau petugas yang terkait sudah profesional dan fasilitas sudah sangat mencukupi.

⁸*Ibid hal :82*

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Definisi Pemerintah

Pemerintah dapat dikatakan ada jika adanya sistem sosial yang majemuk yang menyangkut pemenuhan kebutuhan manusia diantaranya keselamatan, tempat tinggal, pakaian dan makanan. Ini perlu adanya kerjasama dari suatu kelompok masyarakat lainnya dan dalam memenuhi suatu kebutuhan sekunder masyarakat maka harus diperlukan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, dan diperlukannya suatu institusi yang bisa mengontrol aktifitas masyarakat.⁹

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup¹⁰:

- a. Menjamin keamanan dari segala kemungkinan serangan dari dalam ataupun dari luar.
- b. Memelihara ketertiban dengan cara mencegah terjadinya gesekan-gesekan yang timbul di masyarakat.
- c. Menjamin negara tersebut memperlakukan yang adil kepada setiap warga nya.
- d. Melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Melakukan peningkatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat
- f. Menerapkan suatu kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat dan juga menguntungkan berlangsungnya suatu ekonomi sebuah negara.
- g. Menerapkan suatu kebijakan atau peraturan dalam hal untuk menjaga ataupun memelihara sumber daya alam yang dimiliki.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut kemudian bisa disimpulkan menjadi 2 macam yaitu:

- a. Pemerintah disini mempunyai fungsi primer yaitu sebagai penyedia jasa publik yang baik dan juga termasuk layanan suatu birokrasi negara.
- b. Selanjutnya pemerintah juga mempunyai fungsi sekunder yaitu sebagai penyelenggaraan pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat.

⁹<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051010-3-Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 16.30 WIB

¹⁰Rasyid, *Hukum Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, hlm. 57-3

3. Definisi Pemerintah daerah

Indonesia sejak berdiri telah terbagi-bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri dimana diatur dalam undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah.

Dalam bukunya bagir manan menyatakan kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab¹¹. Beliau juga menjelaskan apa itu kewenangan otonomi yang luas beliau mendefinisikan keleluasaan suatu daerah untuk menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan yang memiliki kewenangan hampir dalam semua bidang pemerintahan dikecualikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan umum, moneter maupun fiskal, dan yang terakhir agama. Ada juga kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, di samping itu keleluasaan otonomi dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.¹²

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/ badan/ lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini,¹³ pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang

¹¹ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum 2005. hlm.37-38

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*).¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah suatu pemberian legalitas hukum kepada orang atau pelaku usaha, biasanya perizinan diberikan dalam bentuk izin maupun tanda daftar izin usaha. Izin adalah instrumen yang biasanya digunakan di hukum khususnya di hukum administrasi, izin ditujukan untuk mengedalikan suatu tingkah laku masyarakat.¹⁵ Selain itu izin dapat diartikan dalam lingkup sempit maupun luas yaitu¹⁶:

- a) Izin disini diartikan dalam arti yang luas yaitu semua yang menimbulkan akibat yang kurang lebihnya sama, bahwasannya dalam bentuk tertentu itulah biasanya seseorang atau perusahaan diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mestinya hal itu adalah dilarang.
- b) Selanjutnya Izin dalam artian sempit disini dimaknai suatu tindakan yang dilarang, dibolehkan kecuali, dengan syarat agar ketentuan itu dapat teliti dan diberikan batasan bagi tiap kasus perizinan yang telah diberikan.

2. Motif dan Tujuan Perizinan

Spelt dan ten Berge menyatakan bahwa motif sistem perizinan dapat dibagi menjadi 5 yaitu¹⁷ :

- a. keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. mencegah bahaya bagi lingkungan.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 2-3.

¹⁷ Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo. Hal : 11

- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, yang harus memenuhi syarat tertentu.

Selanjutnya Tujuan dari adanya suatu perizinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu¹⁸:

- 1) Dari sisi pemerintah pemberian izin bertujuan untuk :
 - a) Pertama melaksanakan peraturan yang terkait.
 - b) Kedua Sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten atau pun provinsi.
- 2) Dari sisi Masyarakat sendiri izin bertujuan untuk:
 - a) Supaya adanya suatu kepastian hukum.
 - b) Adanya kepastian hak yang diberikan.
 - c) Mendapatkan fasilitas yang sudah diatur oleh negara atau pemerintah setelah bangunan tersebut mempunyai izin.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Definisi Pertambangan

Definisi dari Pertambangan adalah suatu proses kegiatan guna untuk pencarian, penambangan, mengolah, memanfaatkan dan menjual bahan galian seperti (mineral, batubara, panas bumi, migas).¹⁹ Pandangan sebuah kegiatan industri pertambangan berpedoman kepada pertambangan itu haruslah berwawasan atau berlandaskan lingkungan dan berwawasan berkelanjutan, yaitu²⁰ :

- a. Penyelidikan Umum
- b. Eksplorasi
- c. Studi kelayakan
- d. Persiapan produksi
- e. Penambangan

¹⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200

¹⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan> diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 08.00 WIB

²⁰*Ibid.*

- f. Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
- g. Pengolahan
- h. Pemurnian
- i. Pemasaran
- j. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- k. Pengakhiran Tambang

Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu pertambangan itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari secara teoritis dan praktik hal-hal yang menyangkut usaha pertambangan harus berdasarkan dengan suatu prinsip pertambangan itu harus baik dan benar (*good mining practice*).²¹

Dalam pasal 1 UU No. 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral menyebutkan dengan jelas²²

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”

Disini terlihat jelas bahwa undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pertambangan bukan saja terkait dengan penggalian dan pengangkutan saja, tetapi juga menyangkut penelitian sampai kegiatan pasca tambang yang perlu diperhatikan oleh stakeholder dan pengusaha yang terkait. Dalam pasal 1 angka 19 dalam UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengartikan apa itu penambangan.

*“Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya.”*²³

²¹ *Ibid.*

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

²³ *Ibid*

1. Asas-asas Hukum Pertambangan

Dalam pasal 2 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terdapat 7 asas hukum mineral dan batu bara yaitu²⁴ :

- a) Asas manfaat merupakan asas dimana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara itu harus dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Hukum itu harus memberikan manfaat yang nyata bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep *utility* ini yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan.
- b) Asas keadilan dimana di asas ini pengelolaan dan manfaat mineral dan batubara, didalam pemanfaatannya itu haruslah memberikan hak yang sama dan rata untuk masyarakat banyak bukan hanya untuk pengusaha tambang saja. Masyarakat sekitar tambang dapat juga diberikan hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan pertambangan mineral dan batubara yang terkandung di daerah tersebut, dan masyarakat juga dibebani kewajiban untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar area tambang. Selama ini, masyarakat merasa kurang mendapat perhatian khususnya dari pemerintah pusat maupun daerah, karena pemerintah pusat maupun daerah selalu memberikan hak yang istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar maupun pengusaha-pengusaha tambang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batubara.
- c) Asas keseimbangan yang dimaksud disini adalah menghendaki bahwa pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara yang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin sendiri. Pemberi izin dapat menuntut haknya kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin pertambangan dapat menuntut haknya kepada pemberi izin pertambangan supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin yang sudah diterbitkan, seperti memberi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin pertambangan. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara pemegang izin pertambangan dan pemberi izin pertambangan.
- d) Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah suatu asas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa dan masyarakat kecil. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor pertambangan. Namun, disini lain pemerintah pusat maupun daerah juga harus memerhatikan kepentingan investor.
- e) Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam melaksanakan suatu pertambangan mineral dan batubara, Wujud peran serta masyarakat itu sangat penting, yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang mineral dan batu bara, dalam bentuk menjadi pengusaha maupun distributor.
- f) Asas transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan suatu pertambangan mineral dan batubara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya adalah setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin tambang harus disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat sekitar tambang.

²⁴http://www.academia.edu/4757061/ASAS-ASAS_HUKUM_PERTAMBANGAN_MINERAL_DAN_BATUBARA diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 08.00 WIB

- g) Asas akuntabilitas, yaitu setiap usaha pertambangan mineral dan batu bara harus dapat dipertanggung jawabkan kegiatan tersebut kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku. Asas akuntabilitas ini berkaitan dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang terjadi.
- h) Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan disini dimaksudkan adalah asas yang secara terencana ada kesinambungan antara ekonomi, lingkungan sekitar, dan sosial budaya untuk mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang bisa dimanfaatkan masa kini atau masa yang akan datang.

2. Tujuan pengelolaan mineral dan batubara²⁵

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengadilan kegiatan usaha pertambangan secara berdayaguna, berhasil guna, dan berdaya saing.
 - b. Menjamin adanya manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan guna terwujudnya pertambangan itu bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - c. Menjamin adanya kandungan mineral dan batubara guna sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
 - d. Mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemampuan yang dimiliki agar lebih mampu bersaing nasional maupun internasional.
 - e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
3. Menjamin kepastian hukum dalam seluruh kegiatan pertambangan mineral.
4. Jenis-jenis Wilayah Pertambangan

Ada banyak jenis Wilayah pertambangan menurut UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan definisi dari wilayah pertambangan menurut pasal 1 angka 29 yaitu²⁶ :

"wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat ciengar, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional."

Dari wilayah pertambangan itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 yaitu wilayah usaha pertambangan yaitu²⁷:

"Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi"

"Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilaukan kegiatan usaha pertambangan Rakyat"

²⁵ Ibid.

²⁶ Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tetnang pertambangan mineral dan batubara

²⁷ Ibid. angka 31, 31, 33

“Wilayah pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional”

Dalam Menentukan wilayah usaha pertambangan yang terpenting harus menjadikan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjadi dasar hukumnya seperti dijelaskan pada : pasal 14, dan pasal 18 yaitu :

Dalam pasal 14 menjelaskan

“(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 1 ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”²⁸

Pasal 18 menjelaskan

“Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP 4 dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;*
- b. kaidah konservasi;*
- c. daya dukung lingkungan;*
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara; dan*
- e. tingkat kepadatan penduduk.”²⁹*

Dan untuk WPN harus memenuhi ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan pasal 27 dan 28 yaitu yang berbunyi :

Dalam Pasal 27 Menjelaskan

“(1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicanangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya rencana menjadi WUPK”³⁰

²⁸ Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambnagn mineral dan batubara

²⁹ *Ibid.*

³⁰ undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
<http://prokum.esdm.go.id/pp/2010/PP%2023%20Tahun%202010.pdf>

Pasal 28 Menjelaskan

“Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri*
- b. sumber devisa negara*
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;*
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;*
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau*
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar”³¹*

E. Tinjauan Umum Sungai

1. Pengertian sungai

Sungai itu sendiri bisa didefinisikan sebagai aliran air yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Ada juga jenis sungai yang letaknya ada di bawah tanah. Misalnya sungai bawah tanah di *Gua Hang Soon Dong* di Vietnam, sungai bawah tanah di Yucatan (Meksiko), sungai bawah tanah di Gua Pindul (Indonesia). Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Pengujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es/salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah

³¹ undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
<http://prokum.esdm.go.id/pp/2010/PP%2023%20Tahun%202010.pdf>

untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai (DAS).³²

Sedangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2011 tentang sungai³³ memberikan pengertian tentang sumber daya air dalam pasal 1 angka 1 yaitu :

“Sungai merupakan alur memanjang untuk wadah air secara alami maupun buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, yang dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

2. Jenis sungai dan sumber air sungai

Berdasarkan debit airnya (volume airnya), sungai dibedakan menjadi 4 macam yaitu sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai ephemeral³⁴ yaitu:

- a. Yang pertama adalah sungai permanen yaitu sungai itu mempunyai debit airnya sepanjang tahun itu stabil atau tetap.
- b. Kedua adalah sungai periodik, yaitu sungai pada musim hujan debit air yang ada atau yang terdapat itu biasanya banyak, dan kebalikannya pada musim kemarau debit airnya kecil.
- c. Ketiga adalah sungai episodik, yaitu sungai yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan sungai periodik bedanya adalah kalau musim kemarau debit air sungai biasanya kering atau tidak ada sebaliknya pada musim hujan debit airnya banyak.
- d. Keempat adalah sungai ephemeral, yaitu sungai pada dasarnya ada airnya hanya saja pada waktu tertentu contohnya pada musim hujan.

³²<https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai> diakses pada tanggal 19 agustus pukul 10.00

³³peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2011 tentang sungai

³⁴http://skp.unair.ac.id/repository/web-pdf/web_Mengenal_Jenis_-_Jenis_Sungai_BAGUS_RIZKI_NOVIANTO.pdf

Berdasarkan sumber airnya sendiri sungai masih dapat dibedakan menjadi tiga yaitu³⁵ :

- a. Sungai Hujan, adalah sungai yang airnya itu berasal dari adanya musim hujan
- b. Sungai Gletser, adalah sungai dimana airnya berasal dari adanya pencairan es yang terjadi.
- c. Sungai Campuran, adalah sungai dimana airnya berasal pencampuran yang berasal dari adanya pencairan es, dari adanya musim hujan, dan dari sumber mata air lainnya.

F Tinjauan Umum Surat Edaran

1. Surat Edaran

Surat edaran adalah sebuah surat yang berisikan aturan yang diberitahukan secara resmi untuk beberapa pihak atau orang yang bersangkutan.

Surat edaran biasanya isinya menyangkut beberapa penjelasan mengenai suatu hal yang ingin disampaikan untuk beberapa pihak. Biasanya surat edaran ini umumnya ditujukan untuk kalangan masyarakat umumkan tetapi bisa juga ditujukan kepada orang-orang tertentu. Contohnya surat edaran dari kepala sekolah untuk para guru nya, kepala sekolah kepada para siswanya, dari rector suatu universitas untuk para. Surat edaran juga termasuk kedalam jenis surat resmi karena memakai bahasa yang resmi, singkat, jelas, padat dan menggambarkan dari organisasi yang membuat³⁶.

2. Fungsi dan macam-macam Surat Edaran

Salah satu fungsi surat edaran yaitu untuk menyampaikan suatu informasi atau pengumuman kepada orang banyak yang sifatnya tidak rahasia. Jenis-jenis dari surat edaran ini bisa digolongkan menjadi 2 bagian yaitu³⁷:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ www.gurupendidikan.co.id diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul 09.00

³⁷ *Ibid*

- a. Surat edaran terbatas itu adalah surat yang ditujukan untuk satu organisasi atau instansi yang terkait.
- b. Surat edaran tidak terbatas adalah surat yang ditujukan khususya kepada masyarakat umum.

3. Bagian-Bagian dari surat edaran

Adapun bagian-bagian dari surat edaran bisa digolongkan menjadi 3 yaitu³⁸:

a. Kepala surat (bagian teratas dalam surat)

Pada kepala surat ini ada yang namanya disebut dengan kop. Kop ini terdiri dari logo, nama dan alamat instansi. Lalu selanjutnya di bagian kiri bawah surat edaran biasanya ditulis nomer surat, terus sifat suratnya bagaimana, dan juga perihal serta alamat yang dituju di dalam surat edaran. Pada bagian kanan surat edaran ditulis tanggal, bulan dan tahun kapan surat edaran itu dibuat.

b. Isi surat

Bagian Isi surat edaran merupakan informasi apa yang ingin disampaikan atau pesan apa yang ingin dimuat didalamnya

c. Kaki surat

Pada bagian ini berisikan nama jabatan pembuat surat edaran, tandatangan pengirim surat edaran, nama lengkap pembuat surat edaran, stempel (organisasi, instansi ataupun lembaga) yang membuatnya dan tembusan jika memang itu diperlukan.

³⁸*Ibid*